

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai wujud peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mengelola sumber daya yang tersedia, antara lain membentuk model kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta, tujuannya adalah menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1999:108). Era reformasi otonomi daerah ditandai dengan lahirnya dua produk undang-undang, yaitu UU. No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang menimbang : a). bahwa sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang - Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah; b) bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Undang - Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah yang menimbang; a). bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek - aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas - luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara; b). bahwa Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti. Lahirnya Undang - Undang tersebut disambut positif oleh banyak kalangan dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktik - praktik sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal.

Era reformasi otonomi telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mengembangkan sendiri potensi daerah yang dimilikinya. Dengan kata lain, daerah diberi wewenang untuk mengelola sendiri keuangannya sekaligus menentukan arah pembangunan yang

akan dilaksanakan demi tercapai kemakmuran penduduk di wilayahnya, dengan mempertimbangkan segenap potensi, sumber daya serta faktor - faktor lainnya, baik dalam penyusunan evaluasi pembangunan ekonomi di daerah yang telah dilaksanakan maupun dalam perumusan perencanaan di masa yang akan datang.

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, keberadaan administratif Kabupaten Pringsewu ini dikukuhkan berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung Tanggal 26 November 2008.

Tabel 1. Kontribusi sektor - sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pringsewu Tahun 2008 - 2013 (dalam %)

Sektor Ekonomi	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	50.90	46.27	42.62	39.41	38.13	36.61
Pertambangan & penggalian	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Industri pengolahan	4.23	4.39	4.42	4.34	4.37	4.37
Listrik, gas & air bersih	0.79	0.74	0.73	0.67	0.66	0.64
Bangunan	4.56	4.59	4.75	4.98	5.03	4.93
Perdagangan, hotel & restoran	16.99	16.92	16.53	16.44	16.67	16.72
Pengangkutan & komunikasi	5.73	5.96	6.34	6.86	7.09	7.31
Keuangan, persewaan & prsh	6.13	6.33	6.64	6.78	6.87	6.88
Jasa-jasa	10.63	14.76	17.94	20.49	21.16	22.51
PDRB ADHK 2000	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Pringsewu (diolah)

Perekonomian Kabupaten Pringsewu yang menunjukkan pertumbuhan dan kemajuan yang pesat sejak dimekarkan dari Kabupaten Tanggamus. Struktur perekonomian Kabupaten Pringsewu kurun waktu 2008 - 2013 didominasi oleh

sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Tahun 2008 - 2013 rata-rata kontribusi sektor tersebut adalah sebesar 42.32%. Sub sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang PDRB Kabupaten Pringsewu yang terbesar sesungguhnya adalah sub sektor tanaman bahan makanan. Selain sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, ada 2 (dua) sektor lain yang kontribusinya terlebih cukup signifikan mempengaruhi nilai PDRB Kabupaten Pringsewu yaitu sektor perdagangan, restoran dan hotel yang memberikan kontribusi rata-rata sebesar 16.71% pada kurun waktu 2008 - 2013. Sub sektor perdagangan, restoran dan hotel sebagian besar bersumber dari sub sektor perdagangan besar dan eceran. Selanjutnya adalah sektor jasa-jasa, yaitu memberikan kontribusi rata-rata sebesar 17.91%.

Perekonomian Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2013 telah mengalami pertumbuhan sebesar 6.22%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Pringsewu tumbuh dan berkembang dengan baik. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor jasa-jasa, yakni sebesar 12.99%. Sektor dengan pertumbuhan tertinggi kedua adalah sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh sebesar 9,46%. Sementara itu sektor perdagangan, hotel dan restoran, yang tumbuh sebesar 6.55%, merupakan sektor dengan pertumbuhan tertinggi ketiga. Ditinjau dari perekonomian Provinsi Lampung, maka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu pada tahun 2013 berada pada peringkat ke empat. Pada tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,95%. Jika dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2010 dan tahun 2011 maka

laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu berada diatas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu pada tahun 2012 sedikit menurun dari pada pertumbuhan ekonomi di tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi di tahun 2012 sebesar 6,70%.

Tabel 2. Kontribusi sektor - sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB Provinsi Lampung Tahun 2008 - 2013 (dalam %)

Sektor Ekonomi	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	41.63	40.60	38.69	38.18	37.32	36.61
Pertambangan & penggalian	2.36	2.04	1.86	1.98	1.94	2.02
Industri pengolahan	13.29	13.40	13.49	13.30	13.02	13.22
Listrik, gas & air bersih	0.35	0.34	0.37	0.38	0.40	0.42
Bangunan	4.90	4.89	4.77	4.84	4.80	4.65
Perdagangan, hotel & restoran	15.76	16.04	15.93	15.80	15.65	15.46
Pengangkutan & komunikasi	6.33	6.70	7.30	7.76	8.27	8.42
Keuangan, persewaan & prsh	7.82	8.41	10.04	10.08	10.71	11.06
Jasa-jasa	7.55	7.59	7.55	7.68	7.89	8.14
PDRB ADHK 2000	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (diolah)

Berdasarkan Tabel 2 tersebut tampak bahwa sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peranan paling rendah dalam perekonomian Provinsi Lampung pada tahun 2009 sebesar 0.34 persen. Sementara itu sektor pertanian adalah sektor ekonomi yang paling besar sumbangannya dalam perekonomian Provinsi Lampung pada Tahun 2008. Sekitar 41.63% perekonomian Provinsi Lampung merupakan kontribusi sektor Pertanian. Rendahnya peranan sektor listrik, gas dan air bersih dan besarnya peranan sektor Pertanian dalam perekonomian Provinsi Lampung tidak hanya terjadi pada 2008 tetapi terjadi pada tahun-tahun selanjutnya. Pada tabel diatas dari sektor industri pengolahan sekitar 13.22% dan sektor perdagangan, hotel dan restoran berkisar

15.46% pada tahun 2013 mengalami penurunan disebabkan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pada tahun 2013 berkisar 11.06%. Pada tahun 2013 sektor pengangkutan & komunikasi mengalami kenaikan berkisar 8.42% diakibatkan sektor jasa - jasa mengalami kenaikan pada tahun 2013 berkisar 8.14%. Sedangkan nilai pada sektor bangunan berkisar 4.65% mengalami penurunan pada tahun 2013 disebabkan karena sektor pertambangan dan penggalian mengalami kenaikan berkisar 2.02% pada tahun 2013.

Sejalan dengan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pembangunan daerah Kabupaten Pringsewu merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang dilakukan secara terus menerus untuk menuju kearah perubahan yang lebih baik. Adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintah menuntut pihak pemerintah daerah untuk lebih mengutamakan prinsip - prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi daerah.

Pada era reformasi otonomi daerah paradigma baru dalam pembangunan daerah, keberhasilan pembangunan tidak lagi hanya diukur dari kemajuan fisik yang diperoleh atau berapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima.

Keberhasilan pembangunan harus dapat diukur dengan parameter yang lebih luas dan lebih strategis yang meliputi semua aspek kehidupan baik materil dan non materil. Agar dapat memenuhi kriteria luas dan strategis tersebut, maka pelaksanaan pembangunan harus diawali berdasarkan prioritas dan pemilihan sasaran - sasaran yang mempunyai nilai strategis dan memberikan dampak yang positif dan meningkatkan citra Kabupaten Pringsewu dengan membangun sektor -

sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pringsewu.

Untuk mengetahui potensi pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Pringsewu diperlukan suatu metode yang berguna untuk mengkaji dan memproyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil untuk mempercepat laju pertumbuhan yang ada.

Teori basis ekonomi berdasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan kegiatan non basis. Kegiatan basis adalah semua kegiatan baik penghasil produk mampu penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah. Lapangan kerja dan pendapatan di sektor basis adalah fungsi permintaan yang bersifat exogenous (tidak tergantung pada kekuatan intern/permintaan lokal). Sedangkan kegiatan non basis adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, karena itu permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kenaikan pendapatan masyarakat setempat. Dengan demikian sektor ini terikat terhadap kondisi ekonomi setempat dan tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah. Atas dasar anggapan diatas, satu-satunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan alamiah adalah sektor basis. Oleh karena itu analisis basis sangat berguna untuk mengkaji dan memproyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah. (Tarigan, 2004:27).

Dalam menggunakan pendekatan model basis ekonomi pada umumnya didasarkan atas nilai tambah maupun lapangan kerja. Namun menggunakan data pendapatan (nilai tambah) adalah lebih tepat dibandingkan menggunakan data lapangan kerja. Hal ini dikarenakan lapangan kerja memiliki bobot yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

Salah satu indikator ekonomi yang sangat diperlukan untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator penting di suatu wilayah yang dapat mengindikasikan totalitas produksi netto barang/jasa yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan wilayah. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Pringsewu disumbang oleh 9 (Sembilan) sektor yaitu: pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; jasa - jasa.

Tabel 3. Kontribusi sektor - sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pringsewu Tahun 2008 - 2013 (dalam %)

Sektor Ekonomi	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	40,25	37,37	37,73	37,13	36,99	37,14
Pertambangan & Penggalian	0,05	0,04	0,03	0,03	0,04	0,04
Industri Pengolahan	10,20	10,37	9,91	9,38	9,18	8,95
Listrik, Gas & Air Bersih	1,05	0,94	0,87	0,72	0,73	0,72
Bangunan	6,31	6,40	6,28	6,31	6,21	6,10
Perdagangan, Hotel & Restoran	22,65	22,39	21,08	20,80	20,45	20,02
Pengangkutan & Komunikasi	5,53	5,74	5,95	6,39	6,61	6,87
Keuangan, Persewaan & JS. PRSH	5,49	5,57	5,55	5,60	5,47	5,39
Jasa-jasa	8,46	11,17	12,59	13,61	14,31	14,76
PDRB ADHB 2000	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Pringsewu (diolah)

Peranan setiap sektor ekonomi dalam perekonomian dapat diketahui dari angka distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) seperti yang dapat dilihat melalui Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3 tersebut tampak bahwa sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peranan paling rendah dalam perekonomian Kabupaten Pringsewu pada tahun 2008 sebesar 1,05%. Sementara itu sektor pertanian adalah sektor ekonomi yang paling besar sumbangannya dalam kontribusi perekonomian Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2008. Sekitar 40,25% perekonomian Kabupaten Pringsewu merupakan kontribusi sektor Pertanian. Rendahnya peranan sektor listrik, gas dan air bersih dan besarnya peranan sektor Pertanian dalam perekonomian Kabupaten Pringsewu tidak hanya terjadi pada 2008 tetapi terjadi pada tahun - tahun selanjutnya. Pada tabel diatas dari sektor bangunan sekitar 6,10% dan sektor industri pengolahan berkisar 8,95% pada tahun 2013 mengalami penurunan disebabkan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pada tahun 2013 berkisar 5,39%. Pada tahun 2013 sektor pengangkutan & komunikasi mengalami kenaikan berkisar 6,87% diakibatkan sektor jasa - jasa mengalami kenaikan pada tahun 2013 berkisar 14,76%. Sedangkan nilai pada sektor perdagangan, hotel dan restoran berkisar 20,02% mengalami penurunan pada tahun 2013 disebabkan karena sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menurun berkisar 5,39% pada tahun 2013. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan menganalisis potensi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2008 - 2013.

Dalam rangka membangun daerah, pemerintah daerah perlu membuat prioritas kebijakan. Penentuan prioritas kebijakan diperlukan agar pembangunan daerah dapat lebih terarah serta berjalan secara efektif dan efisien, dibawah kendala keterbatasan anggaran dan sumberdaya yang dapat digunakan. Untuk menentukan prioritas kebijakan ini, khususnya kebijakan pembangunan ekonomi, diperlukan analisis ekonomi (struktur ekonomi) daerah secara menyeluruh. Terkait dengan hal tersebut, maka penulis akan mencoba membahas beberapa teknik dan alat yang dapat digunakan dalam menganalisis struktur ekonomi daerah yaitu menggunakan tipologi pada masing – masing sektor.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas muncul beberapa pertanyaan :

1. Bagaimana perkembangan PDRB selama 6 tahun (tahun 2008 - 2013) pada masing - masing sektor di Kabupaten Pringsewu ?
2. Sektor - sektor ekonomi mana yang potensial untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pringsewu ?
3. Bagaimana tipologi pada masing - masing sektor di Kabupaten Pringsewu ?

Untuk memecahkan masalah tersebut perlu adanya usaha peningkatan kemampuan di bidang ekonomi (PDRB) dengan pendekatan basis ekonomi, pendekatan basis ekonomi ini ditujukan untuk mengidentifikasi sektor - sektor mana yang paling unggul dan strategis untuk dikembangkan.

C. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui perkembangan PDRB selama 6 tahun (tahun 2008 - 2013) pada masing - masing sektor di Kabupaten Pringsewu.
2. Mengetahui sektor - sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pringsewu.
3. Mengetahui tipologi pada masing - masing sektor di Kabupaten Pringsewu.

D. Manfaat

Selain itu penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Tambahan informasi dan bahan kajian tentang gambaran/informasi tentang potensi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pringsewu sehingga pemerintah daerah dapat lebih mengembangkan potensi daerahnya.
2. Dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan Kabupaten Pringsewu dalam rangka program pembangunan selanjutnya dan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

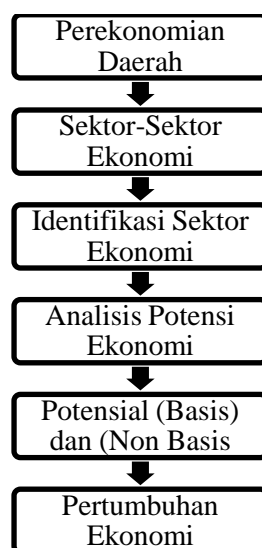
E. Kerangka Pemikiran

Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah merupakan serangkaian usaha kebijaksanaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meratakan distribusi pendapatan, meningkatkan hubungan ekonomi antara wilayah di dalam region maupun antar region dan mengembangkan ekonomi secara sektoral maupun antar lintas sektoral

yang lebih menguntungkan didukung dengan strategi peningkatan sumber daya manusia.

Pertumbuhan suatu daerah terjadi sebagai akibat adanya permintaan barang dan jasa tertentu terhadap suatu daerah oleh daerah lainnya. Upaya memenuhi permintaan ekspor tersebut dengan menggerakkan potensi dan sistem produksi lokal akan memberikan pertumbuhan ekonomi bagi daerah yang bersangkutan. Semakin tinggi permintaan luar daerah dapat dipenuhi berarti semakin tinggi pula aktivitas perekonomian lokal dan pertumbuhannya. Pertumbuhan daerah berdasarkan pendekatan wilayah yang sangat umum dikenal adalah teori pertumbuhan berbasis ekspor.

Teori pertumbuhan berbasis ekspor didasarkan atas pemikiran bahwa suatu wilayah harus meningkatkan arus atau aliran langsung dari luar wilayah agar bisa tumbuh secara efektif yaitu dengan cara meningkatkan ekspor. Teori pertumbuhan berbasis ekspor memisahkan kegiatan ekonomi dalam dua sektor yang terpisah, yaitu sektor basis dan sektor non basis.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pringsewu